

PELATIHAN DISEMINASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI BAGI PENGURUS ORGANISASI INTRA KAMPUS

Mufarizuddin^{1*}, Putri Hana Pebriana², Sumianto³

^{1,2,3}Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Indonesia
zuddin.unimed@gmail.com, putripebriana99@gmail.com, anto.pgsduniversitaspahlawan@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Dalam memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan *respresif*, namun yang lebih mendasar lagi adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui *preventif* ini adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan kegiatan adalah dengan adanya pendidikan karakter antikorupsi diharapkan munculnya rasa tanggung jawab untuk memberantas korupsi dan memberikan contoh pada masyarakat luas. Tim pengabdian masyarakat ini melakukan beberapa metode yaitu ceramah, tanya jawab dan simulasi dengan pemutran film tentang karakter anti korupsi dan selanjutnya diberikan *pre-test* yang digunakan untuk melihat pengetahuan mahasiswa terhadap karakter anti korupsi, metode ceramah, metode tanya jawab dan metode simulasi hal ini dilakukan agar Pengurus HIMA memahami pendidikan Antikorupsi dengan baik. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya pengurus HIMA PGSD tentang pendidikan anti korupsi, termasuk pemahaman, aturan dan implementasi pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter Anti Korupsi; Pengurus HIMA Prodi PGSD

Abstract: *In eradicating corruption in Indonesia, it is not enough just to take a respectful action, but even more fundamental is to take preventive or preventive actions. One of the efforts that can be made through this prevention is to raise awareness to fight various acts of corruption, and at the same time educate the younger generation by instilling ethical and moral values that are necessary in social life. The aim of the activity is that with anti-corruption character education, it is hoped that a sense of responsibility will emerge to eradicate corruption and provide an example to the wider community. This community service team carried out several methods, namely lectures, questions and answers and simulations with film screenings about anti-corruption characters and then given a pre-test which was used to see student knowledge of anti-corruption characters, lecture methods, question and answer methods and simulation methods. so that the HIMA Management understands Anti-corruption education well. The results achieved in this activity were to provide understanding to students, especially PGSD HIMA administrators about anti-corruption education, including understanding, rules and implementation of anti-corruption education in tertiary institutions.*

Keywords: *Anti-Corruption Character Education; Management HIMA PGSD Study Program*



Article History:

Received : 15-03-2021
Revised : 29-05-2021
Accepted: 30-05-2021
Online : 14-06-2021



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Masalah pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan salah satu program reformasi yang dicetuskan oleh para mahasiswa pada tahun 1998. Dalam kenyataannya tindak pidana korupsi telah membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional dan pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan sehingga perlu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus dengan kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan TPK, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Pemikiran inilah yang melandasi lahirnya Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya (Eko Handoyo, Subagyo, Martien Herna Susanti, 2014).

Bagi bangsa Indonesia, Korupsi adalah persoalan nilai, dalam hal ini korupsi memiliki nilai yang buruk, karena didalamnya mengandung keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian (Nawawi, 2016). Secara sinis, orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi, baik dilakukan oleh eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya benar dalam realitasnya, kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, tetapi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat (Komara, 2019).

Menyikapi fenomena korupsi yang makin marak terjadi, dunia pendidikan pun mulai melakukan pembenahan-pembenahan untuk menjawab tantangan derasnya arus korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang gencar dibicarakan belakangan ini adalah masuknya pendidikan karakter anti korupsi pada tingkat pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi pada tahun ajaran 2012/2013. Walaupun kurikulum karakter anti korupsi baru dilaksanakan pada tataran perguruan tinggi berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 1016/E/T/2012 perihal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi pada tahun ajaran 2012/2013. Kurikulum tersebut, diharapkan juga akan masuk dalam silabus-silabus mata pelajaran untuk siswa-siswa SLTA,SLTP, dan SD. Sedangkan pengajarnya adalah guru-guru yang telah diberi training bagaimana mengajarkan pendidikan karakter antikorupsi. Penyebaran pendidikan antikorupsi ini pun akan dilakukan secara bertahap (Anggraini & Valentine, 2019).

Sekolah atau Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan yang ikut bertanggungjawab dalam upaya membentuk pribadi positif. Terutama pada Perguruan Tinggi perilaku-perilaku positif perlu dibentuk sebagai pondasi dalam membangun jiwa antikorupsi pada seluruh mahasiswa di Perguruan Tinggi. Korupsi adalah persoalan nilai, dalam hal ini korupsi memiliki nilai yang buruk, karena didalamnya mengandung keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian (Kemendikbud, 2011).

Dalam sejarah Indonesia, kehadiran mahasiswa tidak pernah lepas dari peran sentral yang dimainkan. Mulai dari Soetomo, Soekarno, Hatta, Akbar Tanjung, Rachman Tolleng, Fahmi Idris, Hariman Siregar, hingga Rama Pratama menjadi pelopor pada zamannya masing-masing dalam menggerakkan perubahan sosial politik di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Saidi (Saidi, 1989) berkat dibukanya pendidikan tinggi pada awal abad ke-20, mereka sudah mempunyai kesadaran politik. Kesadaran politik ini tidak ditujukan untuk meraih kekuasaan politik, tetapi dimaksudkan untuk menggugah kesadaran kaum pribumi akan pentingnya roh keindonesiaan dan sekaligus meningkatkan harkat martabat dan derajat kaum pribumi. Betapa mulia tujuan gerakan mahasiswa dan pemuda pada masa itu.

Sepanjang sejarah Indonesia, mahasiswa berpolitik karena lemahnya lembaga politik atau karena lembaga tersebut memerlukan mahasiswa sebagai kader pemimpin. Banyak di antara aktivis-aktivis gerakan mahasiswa yang selanjutnya menjadi pemimpin, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun di dalam partai-partai politik. Tidak sembarang mahasiswa dapat menjadi pemimpin. Mereka sudah berbekal pengalaman organisasi yang cukup matang, dilandasi oleh nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, solidaritas, keberanian, kepedulian, dan lain-lain. Nilai-nilai inilah yang mengantarkan mereka menjadi pemimpin yang disegani pada masanya.

Mahasiswa pada masa kini pun semestinya mewarisi jiwa kepemimpinan mahasiswa dan pemuda generasi sebelumnya. Kepemimpinan sangat dibutuhkan mahasiswa, karena bangsa dan negara ini memerlukan kehadirannya. Selain itu, kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan, sangat membutuhkan mahasiswa yang memiliki karakter unggul, baik karakter intelektual, emosional, spiritual, maupun moral. Dalam situasi bangsa dan negara yang mengalami krisis kepercayaan, krisis moralitas, dan krisis kepemimpinan, maka sudah selayaknya mahasiswa mendapatkan pendidikan antikorupsi.

Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis mahasiswa (Sakinah & Bakhtiar, 2019). Diharapkan melalui pendidikan mengenai anti korupsi sejak dini dapat menciptakan mahasiswa yang memiliki kepribadian lebih mawas diri, sehingga ketika saatnya terjun ke masyarakat, mahasiswa tidak lagi mudah terpengaruh dan memiliki pengetahuan yang cukup dan benar mengenai anti korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya (Shobirin, 2014).

Pendidikan antikorupsi dibutuhkan, karena akan dapat membentuk karakter mahasiswa yang unggul, sekaligus juga diharapkan pada saatnya nanti ketika menjadi pemimpin dapat dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Apalagi pada diri mahasiswa terdapat 3 (tiga) dimensi

yang harus diasah secara berkelanjutan, yaitu: (1) intelektual, (2) jiwa muda, dan (3) idealisme (Eko Handoyono, 2013).

Pendidikan Antikorupsi sangat diperlukan agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi penting dalam menciptakan Indonesia yang unggul, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Target utama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Disamping itu mahasiswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi (Ahmad Fikri Hadin, 2016).

Mahasiswa adalah cikal bakal penerus bangsa dan diwajibkan memiliki jiwa yang bersih dari perbuatan korupsi. Ketika nanti mahasiswa sudah diberikan penyuluhan anti korupsi, maka selanjutnya mahasiswa juga diharapkan untuk turun ke masyarakat dalam membantu dosen atau akademisi yang ada di perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan anti korupsi. Lembaga pendidikan akan sangat diharapkan perannya dalam memberikan penyuluhan anti korupsi kepada segenap lapisan masyarakat (Yanto et al., 2020). Sehingga pendidikan antikorupsi sangat penting diberikan di perguruan tinggi baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun terintegrasi dengan mata kuliah yang lain, secara khusus ditujukan untuk memberi bekal pengetahuan sekaligus mentransformasikan mahasiswa sebagai agen antikorupsi yang memiliki kompetensi dan komitmen moral yang tinggi (Azyumardi Azra, 2006). Kompetensi dan komitmen ini selanjutnya ditransformasikan lagi ke dalam bentuk nilai-nilai dan gerakan antikorupsi kepada masyarakat dan generasi di bawahnya.

Perguruan Tinggi di Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai-nilai anti korupsi. Karena manusia yang lahir melalui sektor pendidikan adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Perguruan Tinggi sebagai lingkungan kedua bagi mahasiswa, dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Perguruan Tinggi dapat memberikan nuansa yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku antikorupsi. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanaman pola pikir, sikap dan perilaku antikorupsi yaitu melalui kuliah, karena kuliah adalah proses pembudayaan (Saifulloh, 2017). Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cara yang mampu memberikan informasi bagi peserta didik mengenai korupsi. Dengan adanya pendidikan antikorupsi diharapkan ketika mereka menjalankan pemerintahan negara Indonesia kelak, tidak ada lagi korupsi (Hidayat, 2019).

Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, tidak terkecuali pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Maka dengan ini Tim Pengabdian Masyarakat

ingin memberikan pemahaman tentang Korupsi dan bagaimana cara pencegahan Korupsi. Hal ini dilakukan pada salah satu Organisasi Mahasiswa yang ada pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yaitu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah (PGSD) dari data lapangan yang didapati bahwa pengurus HIMA mahasiswa PGSD ini banyak tidak mengetahui hal-hal dasar tentang karakter anti korupsi, mereka cenderung tidak tertarik dan tidak berminat membicarakan mengenai apa itu korupsi, begitu juga dengan para dosen, masih ada dosen yang kurang tertarik dengan kurikulum karakter anti korupsi, mereka beranggapan bahwa pencegahan korupsi hanya merupakan tanggungjawab dari pemerintahan saja. Kondisi ini tentu saja perlu mendapat perhatian khusus dari dunia pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, walaupun kita tahu bahwa setiap kebijakan baru yang diluncurkan akan selalu mendapat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah pertama memotivasi seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa PGSD mempunyai nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, keberanian dalam memerangi korupsi, kedua menyamakan persepsi dikalangan para pengurus dan mahasiswa bahwa tugas pencegahan korupsi tidak saja merupakan tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, ketiga terbentuknya komunitas mahasiswa anti korupsi yaitu gerakan Anti Korupsi. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka diperlukan Pelatihan Diseminasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, melalui kegiatan *workshop for real* yang dipandu oleh tim pengabdian. Melalui kegiatan ini paling tidak dapat mensosialisasikan program pemerintah mengenai keterlibatan *civil society* dalam pencegahan korupsi di tingkat lokal. Pengertian diseminasi dalam kegiatan pengabdian ini adalah adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut: survei, sosialisasi program, identifikasi masalah, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan. Sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. *Pre test*. Untuk melihat pengetahuan mahasiswa terhadap karakter anti korupsi
2. Metode Ceramah. Metode ceramah ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang korupsi dan aspek-aspeknya, penyebab dan dampak korupsi, upaya perlawanan terhadap korupsi, pentingnya budaya anti korupsi bagi pendidikan, implementasi budaya anti korupsi bagi mahasiswa
3. Metode Tanya Jawab. Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan pada saat menerima penjelasan tentang materi, dengan metode ini memungkinkan mahasiswa menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pendidikan karakter anti korupsi
4. Metode Simulasi. Metode simulasi ini sangat penting diberikan kepada para peserta pelatihan untuk memberikan kesempatan

mempraktekan materi pelatihan yang diperoleh. Harapannya, peserta pelatihan akan benar-benar menguasai materi pelatihan yang diterima, mengetahui tingkat kemampuannya menerapkan kegiatan yang mendukung program pemberantasan korupsi dan program pendidikan karakter anti korupsi secara teknis dan kemudian mengidentifikasi kesulitan-kesulitan (jika masih ada) untuk kemudian dipecahkan secara bersama-sama. Hal ini dapat dilihat pada mahasiswa di berbagai aktifitas atau kegiatan-kegiatan HIMA Prodi PGSD dan di lingkungannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan pada Organisasi Mahasiswa di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi PGSD. Pelatihan Diseminasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi bagi Pengurus HIMA Prodi PGSD kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara menanamkan sikap agar tidak melakukan korupsi khususnya pada organisasi HIMA PGSD. Hal ini dapat mencegah perilaku korupsi pada setiap divisi di HIMA Prodi PGSD dan transparansi HIMA di dalam pengelolaan keuangan atau setiap kegiatan-kegiatan HIMA Prodi PGSD nantinya.

Kegiatan ini dilakukan pada bulan 10 Februari tahun 2021 dengan peserta 25 orang mahasiswa pengurus HIMA Prodi PGSD FIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Tim Pengabdian masyarakat ini terdiri dari 3 (tiga) dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pengabdian ini kami menyusun 4 (empat) sesi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan ramah tamah dengan ketua HIMA Prodi PGSD dan Pengurus HIMA Prodi PGSD setaip divisi serta dengan pembina HIMA Prodi PGSD. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan pembukaan sepatah kata dari pembina HIMA Prodi PGSD dan dilanjutkan Oleh Ketua HIMA PGSD memberikan kata sambutan dan dilanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat oleh ketua pengabdian sendiri dan acara selanjutnya simulasi dan materi diseminasi pendidikan anti korupsi. Sesi pertama diawali dengan elaborasi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang konsep korupsi itu sendiri. Pada sesi kedua dilanjutkan dengan simulasi dan pemutaran Film tentang beberapa kasus-kasus korupsi yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar dan terhadap pemerintah dan tidak terlepas dugaan korupsi perguruan tinggi. Sesi ketiga atau sesi terakhir yaitu penyampaian pandangan dari mahasiswa terutama pada anggota HIMA Prodi PGSD mengenai kasus korupsi yang mereka jumpai di lingkungan mereka sendiri yang dilanjutkan dengan pembentukan Gerakan Anti Korupsi dari pengurus HIMA Prodi PGSD. Berikut penjelasan setiap sesi pengabdian yang dilakukan pada Pengurus HIMA Prodi PGSD

1. Pengetahuan Mahasiswa Tentang Korupsi

Pada Sesi ini di fasilitasi oleh Mufarizuddin, M.Pd. Dalam sesi ini mahasiswa diminta untuk menjelaskan sesuai dengan kemampuan mereka untuk menjelaskan dan mengartikan apa itu korupsi dan sekaligus juga menggunakan kasus-kasus terindikasi korupsi yang

mereka jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Khususnya dalam lingkungan keluarga dan sekolah.

Dari 25 orang yang dimintai pendapat tentang mengenai konsep korupsi hampir 90% mereka sudah bisa menjelaskan dan menyebutkan mengenai pengertian korupsi sebagai sebuah kejahatan dengan mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan merugikan Negara/Sekolah. Mereka menyebutkan beberapa contoh-contoh perilaku korupsi yang mereka jumpai di HIMA Prodi PGSD dan Perguruan tinggi mereka. Ada juga dari pengurus HIMA Prodi PGSD mengemukakan adanya temuan temuan di beberapa kegiatan yang dilaporkan pada ketua HIMA yang tidak sesuai dengan pembiayaan kegiatan, ada juga yang mengemukakan kurangnya transparansi dari pengurus HIMA Prodi PGSD dalam memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh HIMA Prodi PGSD.

Dari beberapa kasus yang mereka kemukakan di atas dapat diambil kesimpulan para peserta pelatihan sudah memahami dengan baik konsep korupsi secara sederhana dan praktek-praktek korupsi yang diidentifikasi dilingkungan mahasiswa/ para anggota HIMA Prodi PGSD itu sendiri.

Beberapa penjelasan dan temuan-temuan contoh diatas tentang korupsi fasilitator menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan korupsi dari beberapa pengertian korupsi baik akademis dan organisasi Internasional, Leiken merumuskannya secara minimalis namun cakupannya luas. Menurutnya, korupsi adalah “penggunaan kekuasaan publik (public power) untuk mendapatkan keuntungan (material) pribadi atau kemanfaatan politik” (Afifah Mahdiy Mufidah, Guruh Aryo Santoso, 2019).



Gambar 1. Fasilitator menjelaskan tentang konsep Korupsi

2. Simulasi dan Pemutaran Film Bertemakan Korupsi

Pada sesi berikut ini pemateri memutarakan beberapa film pendek mengenai tentang kasus korupsi di dunia pendidikan serta

pemerintahan, di mana film pendek ini merupakan film yang di dapatkan dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada sesi ini para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil dan masing-masing kelompok diminta untuk membuat kesimpulan dimana praktek korupsi tersebut terjadi dan apa saja yang menjadi indikator korupsi yang ditampilkan dalam film tersebut dan mereka juga bisa memberikan solusi agar praktek tersebut bisa meminimalisir.



Gambar 2 Mahasiswa sedang Menyaksikan Pemutaran Film bertemakan Korupsi

3. Indikator korupsi dari KPK

Pada sesi ini diawali dengan pemaparan materi mengenai pengertian apa itu korupsi, mengenai konsep korupsi, indikator dan solusi ke depannya. Adapun fasilitator dalam sesi ini menyampaikan tentang pemaparan materi mengenai pengertian korupsi, indikator korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depannya khususnya untuk diri mahasiswa itu sendiri dan organisasi HIMA Prodi PGSD. Di dalam kegiatan ini peserta dibagi kembali dalam beberapa kelompok kecil tersebut mereka mendiskusikan pengertian korupsi, mengenai konsep korupsi, indikator dan langkah-langkah dalam pencegahan korupsi, khususnya di lingkungan HIMA Prodi PGSD.

4. Pandangan Mahasiswa tentang Korupsi dan Pembentukan Gerakan Anti Korupsi

Pada sesi terakhir ini fasilitator meminta setiap peserta yaitu mahasiswa diminta pandangannya mengenai konsep korupsi dan apa langkah-langkah pencegahannya ke depan, khususnya yang terjadi di lingkungan sekolah dan apa langkah-langkah pencegahan ke depan, khususnya yang terjadi di lingkungan Kampus dan dalam organisasi HIMA Prodi PGSD. Pada sesi ini mahasiswa sepakat untuk menjadi agen dalam pencegahan korupsi di kampus mereka dan mahasiswa sepakat membentuk Gerakan Anti Korupsi yang dipimpin langsung oleh Ketua HIMA Prodi PGSD nya. Mereka sepakat akan menjadi penggerak/motivator dan agen perubahan untuk berperilaku Jujur, amanah dan tidak korupsi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan Anti Korupsi diperlukan di kampus sebagai upaya *preventif* sekaligus untuk menyiapkan generasi yang memiliki karakter antikorupsi. Selain itu, untuk membangun pendidikan antikorupsi tersebut dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan kerjasama semua pihak tanpa terkecuali, baik mahasiswa maupun civitas kampus. Setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran mereka masing-masing. Ketua HIMA Prodi PGSD sebagai leader pada organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Gerakan Anti Korupsi, karena Ketua HIMA Prodi PGSD berhak memutuskan kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan di Organisasinya.

Adapun saran untuk kegiatan ini adalah Pendidikan Anti Korupsi diajarkan dalam mengintegrasikan ke dalam beberapa matakuliah terutama pada matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, Dosen Pengampu matakuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan mengintegrasikan pada matakuliah yang sudah ditentukan dapat menyesuaikan dengan berbagai strategi yang dipilih agar pemahaman Pendidikan Anti Korupsi ini dapat dipahami dengan baik oleh setiap mahasiswa dan Adanya suatu Gerakan Anti Korupsi di Kampus yang di gagas oleh Mahasiswa terutama pada HIMA Prodi PGSD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Tim penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan seluruh pengurus HIMA Prodi PGSD yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah Mahdiy Mufidah, Guruh Aryo Santoso, M. A. M. (2019). Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi. *Unes Law Review*, 2(1), 3–5.
- Ahmad Fikri Hadin, R. F. (2016). Desain Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(2), 162–172. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i2.1533>
- Anggraini, D., & Valentine, T. R. (2019). Pelatihan Diseminasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Pengurus Osis Smp Negeri 31 Padang. *Buletin Ilmiah Nagari Mambangun*, 2(2), 313–321.
- Azyumardi Azra. (2006). *Kata Pengantar Pendidikan Anti Korupsi Mengapa Penting". Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Eko Handoyono, Subagyo, Martien Herna Susanti, A. S. (2014). Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di Sma 6 Kota Semarang. *Skriptorium*, 1(2), 1–14.
- Eko Handoyono. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi*. Penerbit Ombak.
- Hidayat, A. S. (2019). Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(1), 43–54. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10498>
- Kemendikbud. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kemendikbud RI.
- Komara, E. (2019). Peranan Pendidikan Anti Korupsi dalam Menciptakan

- Masyarakat Madani di Indonesia. *Insan Cita: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, 4(1), 77–88.
<http://journals.mindamas.com/index.php/insancita/article/view/1200>
- Nawawi, I. (2016). Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran Di Sekolah Dasar. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 25(1), 12–17. <https://doi.org/10.17977/um009v25i12016p012>
- Saidi, R. (1989). *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*. Mapindo Mulathama.
- Saifulloh, P. P. (2017). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459. <https://doi.org/10.21143/vol47.no4.1591>
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>
- Shobirin, M. (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendas*, 1(2), 107–117. <https://doi.org/10.30659/pendas.1.2.107-117>
- Yanto, O., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Perilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70–84.